

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
(Studi Kasus di Desa Beloro Kecamatan Sebulu)**

Anastasia Mabel, Bambang Irawan, Fajar Apriani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 9 , Nomor 4 ,2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus di Desa Beloro Kecamatan Sebulu)

Pengarang : Anastasia Mabel

NIM : 1602015026

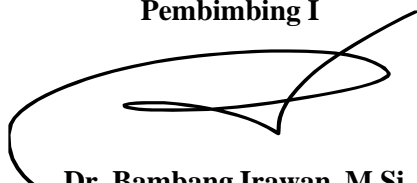
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Administrasi Publik Fisip Unmul.

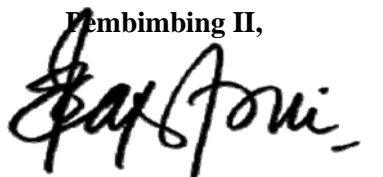
Samarinda, 02 Agustus 2022

Pembimbing I



Dr. Bambang Irawan, M.Si
NIP. 19760216 200501 1 002

Pembimbing II,



Dr. Fajar Apriani, M.Si
NIP. 19830414 200501 2 003

Bagian di bawah ini

DISUSUN OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Ilmu Administrasi Publik	Koordinator Program Studi Administrasi Publik
Volume : 9	 <p><u>Dr. Fajar Apriani, M.Si</u> NIP. 19830414 200501 2 003</p>
Nomor : 4	
Tahun : 2022	
Halaman : 5920-5930	

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Studi Kasus di Desa Beloro)

Anastasia Mabel¹, Bambang Irawan², Fajar Apriani³

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Seksi Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, Pegawai Lapangan Program RTLH, Kepala Desa Beloro, Masyarakat penerima program RTLH di Desa Beloro. Fokus penelitian ini adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dan faktor penghambat dari program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Teknik pengumpulan data menggunakan cara yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara belum berjalan secara efektif. Masih terjadi kekurangan dari segi komunikasi, sumberdaya dan kerjasama antar para pelaksana. Faktor yang menjadi penghambat Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sumberdaya finansial dan pemberian upah tukang yang tidak seimbang dengan anggaran yang dibutuhkan, ketidakpastian faktor alam yang mempengaruhi penyelesaian bangunan serta persyaratan penerima bantuan yang tidak diperuntukan bagi warga dibantaran sungai, penyandang disabilitas dan tidak memiliki lahan sendiri sehingga kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Sosial

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Anastasiamabel07@gmail.com

² Dosen Pembimbing I, Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Pembimbing II, Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun terus bertambah hal tersebut menjadi perhatian khusus dan terus dilakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan baik ditingkat daerah maupun secara nasional. Berikut merupakan data peresentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 1.1 Jumlah dan Prsentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Presentase %
2017 September	218,67	6,08
2018 Maret	218,90	6,03
2019 September	220,91	5,91
2020 Maret	230,26	6,10

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan data tersebut bahwa total penduduk miskin di Kalimantan Timur pada Maret 2018 sebanyak 218,90 ribu (6,03 persen). Dibandingkan dengan total penduduk miskin pada September 2017 sebanyak 218,67 ribu (6,08 persen), dengan demikian jumlah penduduk miskin secara prsentase turun sebsesar 0,05 persen tetapi secara absolut bertambah sebanyak 0,23 ribu orang. Sedangkan pada Maret 2020 sebanyak 230,26 ribu (6,10 persen). Dibandingkan dengan tootal penduduk miskin pada September 2019 sebesar 220,91 ribu (5,91 persen) berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah sebanyak 9,35 ribu orang dan secara prsentase bertambah sebesar 0,19 persen.

Berdasarkan fakta yang ada dilapangan bahwa masih banyak terdapat rumah tangga miskin yang tidak mempunyai rumah layak huni dengan permasalahan tersebut hal itu ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membuat Program RTLH melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelayannan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dengan jumlah data Program RTLH terkini 4.909 dengan jumlah target 25,59% terlaksana di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti dalam tabel beikut ini:

Tabel 1.2

Rekapitulasi Data RTLH Kabupaten Kutai Kartanegara Per Kecamatan

No	Kecamatan	Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Layak Huni	Jumlah	Peresentase %
1.	Muara Muntai	458	21	479	9,2
2.	Loa Kulu	438	15	453	8,7
3.	Loa Janan	257	5	262	5

4.	Anggana	53	1	54	1
5.	Muara Badak	92	1	93	1,7
6.	Tenggarong	345	16	361	6,9
7.	Sebulu	638	20	658	12,6
8.	Kota Bangun	699	89	788	15,2
9.	Kembang Janggut	246	9	255	4,9
10.	Kenohan	259	15	274	5,2
11.	Muara Kaman	296	1	297	5,7
12.	Tambang	0	0	0	0
13.	Samboja	653	24	677	13
14.	Muara Jawa	159	16	175	3,3
15.	Sanga Sanga	98	1	99	1,9
16.	Tenggarong Seberang	148	7	155	2,9
17.	Marang Kayu	5	0	5	0,09
18.	Muara Wis	84	14	98	1,8

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut terlihat bahwa jumlah Rumah Tidak Layak Huni dengan urutan pertama ialah Kota Bangun sebanyak 699 dengan peresentase 15,2% yang kedua Kecamatan Samboja dengan total 653 peresentase 13% selanjutnya Kecamatan Sebulu menjadi urutan ketiga untuk kategori rumah tidak layak huni dengan total 638 rumah dengan peresentase 12.6%.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis mengidentifikasi bahwa program RTLH di Kecamatan Sebulu Desa Beloro menghadapi sejumlah permasalahan pada aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Aspek komunikasi, sudah berjalan secara maksimal namun dengan adanya penggunaan data secara online RTLH mengakibatkan belum berjalan secara maksimal dalam penyampaian sosialisasi ke seluruh desa terkait penggunaan data online RTLH sehingga data cenderung terbengkalai. Hal ini juga disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengisian secara online.
2. Aspek sumberdaya, terbatasnya kemampuan kontruksi SDM dalam menunjang pelaksanaan program RTLH seperti tentang pembuatan rumah, menghitung instruksi rumah, sehingga rab yang di minta ketika diajukan. Saat pengerjaan pembuatan rumah sering banyak kekurangan dalam hal bahan material.
3. Aspek disposisi, sudah seimbangny jumlah Pegawai Lapangan RTLH di Desa Beloro dengan jumlah penduduk Desa Beloro yang banyak namun dengan penambahan Pegawai Lapangan baru Desa Beloro dalam pendataan RTLH data sering terbengkalai karena kurangnya kompetensi.

serta kurang pengalaman sehingga harus merangkap atau melakukan pengulangan kembali pekerjaan.

4. Aspek struktur birokrasi, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta prosedur pelaksana program Desa Beloro antar pelaksana (*implementators*) belum berjalan secara maksimal karena kurang berkoordinasi sehingga masih sering terjadinya kesalahpahaman terkait informasi terbaru data RTLH dan hilangnya komunikasi (*miss communication*) Selain itu masih banyak terdapat perumahan di bantaran sungai yang tidak memiliki lahan di daratan, serta tidak adanya legalitas atas kepemilikan lahan, sehingga hal tersebut yang mengakibatkan jumlah RTLH di Kecamatan Sebulu masih banyak Berdasarkan hasil observasi keempat aspek tersebut secara teoritis terdapat pada model implementasi kebijakan publik Edward (dalam Widodo 2010 :96). Maka dari itu, implementasi program di Desa Beloro yang akan di teliti oleh peneliti ini berfokus pada 4 (empat) aspek tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti bermaksud mencari jawaban atas bagaimana implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara serta faktor penghambat.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Dewey dalam Nawawi (2007:8) kebijakan publik memfokuskan pada masalah-masalah publik. Kebijakan publik menganalisis soal bagaimana isu dan persoalan publik diidentifikasi, disusun dan bagaimana semuanya diletakkan dalam agenda kebijakan dan politik.

Anderson dalam LAN (2000:2) mengatakan bahwa *public policy* merupakan reaksi terhadap tuntutan/klaim dan dukungan dari lingkungan sekitar. Berlandaskan dari pendapatan tersebut, Duun dalam Widodo (2010:13) pun menyampaikan sebenarnya pada sistem kebijakan terdapat 3 elemen ialah:

- a. *Stakeholder* Kebijakan
- b. Kebijakan Publik (*policy contents*)
- c. Lingkungan Kebijakan (*policy environment*)

Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III (dalam Widodo 2010:96) terdapat 4 hal yang dapat menentukan berhasil tau gagal nya dari implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi, komunikasi dalam kebijakan terdapat beberapa dimensi,yaitu:
 - a. Dimensi transmisi menginginkan agar dalam penyampaian kebijakan publik tidak terbatas kepada pelaksana (*implementatos*) namun disampaikan juga bagi kelompok sasaran serta bidang yang perkepentingan.
 - b. Dimensi kejelasan (*clarity*) bertujuan agar kebijakan yang telah disebarkan kepada pelaksan, target tujuan, dan pihak berkepentingan

secara jelas agar substansi dari kebijakan tersebut dapat mengetahui apa menjadi tujuan, maksud dan sasaran sehingga masing-masing para pelaksana dapat mempersiapkan, melaksanakan dan mensukseskan kebijakan publik secara efektif dan efisien.

- c. Dimensi konsistensi (*consistency*) dibutuhkan dalam kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga tidak membingungkan bagi pelaksana kebijakan, target kebijakan dan para pihak yang berkepentingan.

2. Sumberdaya

- a. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
- b. Sumberdaya anggaran menurut Edward III (dalam Widodo 2010:100) keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumberdaya finansial. Selain itu, program tidak dapat terlaksana secara optimal karena terbatasnya finansial mempengaruhi rendahnya perilaku disposisi kebijakan.
- c. Sumberdaya peralatan, menurut Edward III (dalam Widodo 2010:12) ialah sarana yang dipergunakan dalam menjalankan implementasi kebijakan seperti tanah, bangunan gedung, dan media lainnya yang mendukung untuk kemudahan dan kelancaran untuk membantu pelaksanaannya.
- d. Sumberdaya kewenangan, pendapat Edward III (dalam Widodo 2010:103) menyampaikan adanya cukup wewenang untuk mengambil keputusan sendiri didalam suatu sebuah instansi maka akan mempengaruhi instansi tersebut melakukan kebijakan.

3. Disposisi

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (dalam Agustinus 2006:159-160) terkait disposisi dalam implementasi kebijakan ialah:

1. Pengangkatan birokrasi, dalam pemilihan serta penangkatan pegawai pelaksana kebijakan harus orang yang memiliki kontribusi pada kebijakan yang sudah ditetapkan dan mendahului kepentingan masyarakat.
2. Insentif merupakan teknik yang dapat membantu persoalan mengenai tingkah laku dari pelaku kebijakan karena setiap orang akan melakukan sesuatu berdasarkan keinginan sendiri oleh karena itu penyimpangan insentif akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh penyusun kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Widodo 2005:150) menyatakan ada dua ciri utama birokrasi yaitu : "*strandard operational procedure* (SOP) serta *frakmentasi*". Selanjutnya Winarno (2005:150) menyatakan, "*strandard operational procedure* (SOP) ialah rangkaian dari tuntutan internal mengenai kepastian waktu, sumberdaya dan kebutuhan standarisasi dalam organisasi kerja yang luas dan kompleks". Selanjutnya Edward III (dalam Widodo 2010:107)

menyatakan bahwa dengan jelas atau tidaknya standar operasi baik dari mekanisme, sistem serta prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas dan pokok, fungsi, kewenangan, tanggungjawab antar pelaku kebijakan dan ketidakharmonisan antar hubungan.

Perumahan dan Pemukiman

Nurasrizal (2010:29) menyatakan bahwa pengadaan permukiman yang layak huni dapat memajukan kesejahteraan penerima bantuan. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal selain kebutuhan pendidikan, kesehatan dan sandang pangan karena fungsi rumah dapat memenuhi kebutuhan untuk berlindung dari berbagai bahaya alam.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat yang pada tahun 2014 berganti nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BSPS) yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2011.

Adapun pengertian stimulan perumahan swadaya merupakan akomodasi serta sarana prasarana dan kebutuhan anggaran untuk dialokasikan kepada kelompok yang pengasilan rendah. Sementara pengertian perumahan swadaya inisiatif dari masyarakat untuk membangun rumah dengan membentuk kelompok atau secara individu dengan melakukan renovasi ataupun membangun rumah yang baru.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori dan konsep yang ada, maka definisi konsepsional dari Implementasi Kebijakan tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni ialah pelaksanaan keputusan pemerintah melalui kegiatan perbaikan rumah dari kondisi tidak layak huni menjadi layak huni milik masyarakat miskin yang memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan Publik dari Menurut Edward III yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) meliputi:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi

2. Faktor penghambat implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Penelitian ini menggunakan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. *Key informan* selaku sumber data primer adalah Seksi Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara. Informannya yaitu Kepala Desa Beloro, Pegawai Lapangan Program RTLH Desa Beloro Kecamatan Sebulu, Masyarakat Penerima Program RTLH Desa Beloro Kecamatan Sebulu. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen, arsip dan laporan yang ada di Dinas PERKIM dan Desa Beloro. Teknik pengumpulan datanya ialah (1) Tinjauan pustaka (*library research*), (2) Penelitian lapangan (*field work research*) yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis data deskriptif kualitatif dari Miles, Huberman dan Saldana (2021:31-33) yang meliputi kegiatan: (1) Pengumpulan data (*data collection*) (2) Kondensasi data (*data condensation*), (3) Penyajian Data (*data display*), (4) Penarikan dan verifikasi (*conclusions drawing and verifying*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan publik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksana program/kebijakan. Dalam hal ini, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Adapun informasi kebijakan publik dari Edward III (dalam Widodo 210:97) perlunya menyampaikan informasi kepada para pelaku kebijakan sehingga pelaku kebijakan dapat mengetahui mengenai apa yang perlu disiapkan dan dilakukan dalam menjalankan kebijakan agar yang dicapai sesuai harapan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai komunikasi implementasi Program RTLH di Desa Beloro Desa Beloro bahwa segi sosialisasi atau penyuluhan sudah terelaksanakan, pelaksana kegiatan sosialisai berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun, masyarakat penerima masih belum memahami secara benar mengenai program RTLH sehingga sebagian masyarakat sudah beranggapan akan menerima bantuan program RTLH.

b. Sumberdaya

Menurut Edward III (dalam Widodo 2010:98) menyampaikan mengenai faktor sumberdaya memiliki peran sangat penting demi kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan terkait sumberdaya dalam implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup

masyarakat di Desa Beloro Kecamatan Sebulu, dibagi beberapa sumber daya yaitu:

- 1) Sumberdaya manusia, dalam hal ini implemtator dalam implementasi program Rumah Tidak Layak Huni Desa Beloro masih kurang dan belum melakukan pendekatan persuasif dari petugas RTLH ke masyarakat pada saat maupun dalam kegiatan sosialisasi.
- 2) Sumber bahan material dalam implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Beloro belum cukup memadai dibuktikan dengan tidak adanya transparansi mengenai kualitas barang sehingga masih ada kondisi bahan yang mudah rusak.
- 3) Sumberdaya finansial yaitu sudah cukup memadai untuk membiayai kebutuhan bahan material yang diperlukan, selain itu tersedianya anggaran tambahan yang mendukung implementasi program RTLH Desa Beloro seperti penyediaan bantuan untuk merehabilitasi rumah warga dengan menentukan 3 rumah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta kelayakan tempat huniaan. Namun dari sudut pandangan masyarakat dalam hal fasilitas anggaran yang seharusnya transparansi oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan. Serta adanya kesulitan dalam menghadirkan tukang bangunan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak mencapai target penyelesaian yang telah ditentukan oleh para pelaksana Program RTLH.

c. Disposisi

Disposisi menurut Edward III (dalam Widodo 2010:104) ialah keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan darai kebijakan bisaterwujud.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program RTLH di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sudah sejalan berdasakan tugas serta fungsi dari setiap pelaksana progam dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara telah menjalankan komitmen yang dibuktikan secara tertulis berupa disposisi yang diteruskan secara berjenjang melalui surat tertulis yang dibuat oleh Kepala Dinas kemudian dilanjutkan ke Desa kemudian desa terus berkomitmen serta menenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program RTLH. Dan terus mengajukan permohonan agar setiap tahunnya pogram RTLH bisa terlaksana kembali dengan harapan masyarakat Desa Beloro memiliki rumah layak huni dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan melihat kategori penerima bantuan serta pelaksanaan pekerjaan rumah yang penyelesaiannya sesuai dengan target waktu.

d. Birokrasi

Edward III (dalam Widodo 2010:106) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Menurut Edward III (dalam Widodo 2010:107) menyatakan bahwa adanya kejelasan atau tidaknya dari standar operasi, baik itu menyangkut dari mekanisme, prosedur pelaksanaan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab antar pelaku kebijakan dan tidak adanya keharmonisan antar hubungan.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program RTLH di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Struktur birokrasi dalam implementasi program Rumah Tidak Layak Huni dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Beloro Kecamatan Sebulu, bahwa tidak jelasnya standar operasi baik menyangkut mekanisme dan dukungan dari para pihak pelaksana maupun tokoh masyarakat serta *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tidak dilaksanakan dengan baik, menjadi permasalahan di Desa Bekoro. Sehingga saat ini hanya mengandalkan sumber daya manusia dalam hal ini tukang bangunan yang tersedia dan masyarakat harus inisiatif untuk mengadakan tukang bangunan sendiri.

Faktor Penghambat Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Beloro Kecamatan Sebulu

Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaannya memiliki faktor penghambat antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya sumberdaya finansial program karena masih kurangnya kebutuhan dalam pemberian upah tukang yang tidak seimbang dengan anggaran yang dibutuhkan. akibat kurangnya sumberdaya finansial dalam hal pemberian upah tukang, mengakibatkan tidak cukupnya membayar tukang sehingga pengerjaan rumah tidak sampai selesai.
2. Ketidakpastian faktor alam bisa mempengaruhi penyelesaian bangunan sehingga tidak mencapai target waktu yang diberikan. Selain itu kurangnya kesadaran bagi penerima bantuan Program RTLH untuk menyelesaikan proses pekerjaan rumah dengan meminta bantuan kepada tetangga atau kerabatnya keterlambatan pengiriman bahan material bangunan hal ini disebabkan karena penyelesaian rumah yang tidak sesuai target.
3. Selain itu, syarat untuk mendapatkan program RTLH yang tidak bisa diperuntukan bagi warga yang berada di bantaran sungai dan penyandang disabilitas dan bagi warga yang termasuk kategori miskin namun tidak memiliki lahan yang terutama warga Desa Beloro yang berada dibantaran sungai.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum, implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara telah terlaksana cukup baik, namun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala. Secara khusus sesuai sub fokus penelitian ini terdapat kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Komunikasi dalam hal ini kegiatan sosialisai/penyuluhan telah berjalan, namun pemahaman dari masyarakat masih kurang. Hal ini disebabkan komunikasi antar pelaksana dalam hal penyampaian mengenai persyaratan Program RTLH kepada masyarakat penerima Program RTLH yang mengakibatkan adanya pemahaman masyarakat tidak mendapatkan perhatian.
 - b. Sumberdaya yaitu, sumberdaya manusia implemtator dalam implementasi program RTLH Desa Beloro masih kurang dan belum melakukan pendekatan persuasif, sumber bahan material belum cukup memadai dibuktikan kondisi bahan yang mudah rusak, sumberdaya finansial dari sudut pandang masyarakat seharusnya ada transparasi oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.
 - c. Disposisi menunjukan para pelaksana program kebijakan tetap berkomitmen untuk terus memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Beloro Kecamatan Sebulu yaitu sudah sejalan berdasakan tugas serta fungsi dari setiap pelaksana progam dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - d. Struktur Birokrasi bahwa tidak jelasnya stantar operasi baik menyangkut mekanisme dan dukungan dari para pihak pelaksana maupun toko masyarakat serta *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tidak dilaksanagn dengan baiak, menjadi permasalahan di Desa Bekoro. Sehingga saat ini hanya mengandalkan sumber daya manusia dalam hal ini tukang bangunan yang tersedia dan masyarakat harus inisiatif untuk mengadakan tukang bangunan sendiri .
2. Faktot-faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi program RTLH di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain sumberdaya finansial karena masih kurangnya kebutuhan dalam pemeberian upah tukang yang tidak seimbang dengan anggaran yang dibutuhkan. Selain itu, faktor alam bisa mempengaruhi penyelesaian bangunan sehingga tidak mencapai target waktu yang diberikan. Serta syarat untuk mendaptkan program RTLH yang tidak bisa diperuntukan bagi warga yang berada di bantaran sungai dan penyandang disabilitas dan bagi warga yang termasuk kategori miskin namun tidak memiliki lahan yang terutama warga Desa Beloro yang berada di bantaran sungai.

Saran

Berlandaskan pada faktor-faktor penghambat yang sudah dijelaskan mengenai implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam di Desa Beloro Kecamatan Sebulu, maka penulis merekomendasikan saran-saran melihat permasalahan diatas:

1. Komunikasi, perlu evaluasi kembali mengenai penghambabt yang dihadapi para pelaksana dan masyarakat yang jadi kelompok sasaran kebijakan/program sehingga menemukan jalan keluar dengan menjelaskan secara detail mengenai aturan dan katergori sebagai penerima bantuan.
2. Sumberdaya manusia, perlunya kesiapan dari para pelaksana dalam melakukan pendekatan persuasif.

Daftar Pustaka

- Miles, Matthew. B, A, Huberman, Michael dan Saldana, Jhonny. 2014. *Qualitative data analisis, A Method Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication, ine
- LAN. 2000. *Studi Tentang Kesiapan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijaksanaan Otonomi di Kawasan Timur Indonesia*. Makassar:Laporan Penelitian, Perwakilan Susel.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang:Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Buku Seru.
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. (2020). Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Kutai Kartanegara
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS-RTLH).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Nurasrizal. 2010. *Pertumbuhan Rumah Inti Pada Perumahan Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Di Dusun Kayu Gadang Kota Sawahlunto*. Universitas Diponegoro: Tesis yang dipublikasikan. <http://eprints.undip.ac.id/23680/1/NURASRIZAL.pdf> diakses pada 04 Maret 2021 pukul 23:32
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
<https://www.disperkimkukar.com/tentang-kami/>